

TUGAS KLIPING PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
“REFORMASI DEMOKRASI DI INDONESIA”



**Disusun Oleh :**

Amanda Reza Widowati  
4317500043  
Akutansi 2D

**Dosen Pengampu:**

Dr. Eddhie Praptono S.H ,M.H

**PROGRAM STUDI AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PACAKSAKTI TEGAL  
2018**

# Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
<b>BAB I</b>	
1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
<b>BAB II</b>	
2. Kajian Teoritis	
2.1 Pengertian Demokrasi.....	4
2.2 Sejarah Demokrasi.....	6
2.3 Prinsip Demokrasi.....	8
2.4 Unsur--unsur Demokrasi.....	8
<b>BAB III</b>	
3. Pembahasan	
3.1 Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	11
3.2 Pelaksanaan Demokrasi Langsung Pada Orde Reformasi.....	14
3.3 Kronologis Terjadinya Reformasi di Indonesia.....	16
3.4 Kondisi Demokrasi Saat Ini.....	17
<b>BAB IV</b>	
4. Kesimpulan.....	19
Pustaka.....	20



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dari sekian banyak sistem pemerintahan di dunia, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Akan tetapi, dalam penerapan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, hal tersebut telah mengalami beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi politik dan pemimpin kala itu. Demokrasi itu sendiri telah menjadi istilah yang superior dan dijunjung tinggi dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio--politik yang ideal. Ajaran demokrasi merupakan ide besar para filsuf untuk mengkonstruksi rasionalitas kekuasaan yang sulit dijinakkan. Kekuasaan menjadi tema sentral dalam ide demokrasi. Sayangnya, sampai saat ini, negara Indonesia belum memiliki kejelasan yang tepat tentang arti demokrasi itu sendiri.

Sistem demokrasi yang kala itu dikembangkan pada masa reformasi, pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan--peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga--lembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga--lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika kita melihat sistem demokrasi dalam struktur pemerintahan Indonesia dari level negara, provinsi, kabupaten, hingga kecamatan hampir dapat dipastikan demokrasi ini hanya sampai pada pembuatan kebijakan. Sementara jika mencari demokrasi yang merupakan ciri bahwa negara Indonesia mempunyai ciri demokrasi itu sendiri dapat dilihat di level desa.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah pengertian dari demokrasi?
2. Apa saja unsur--unsur demokrasi?
3. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?

### **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui perbedaan paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia dan paham demokrasi yang lainnya sehingga kita dapat mengetahui sisi unggul di dalam Demokrasi Pancasila.

## **BAB II**

### **Kajian Teoritis**

#### **2.1 Pengertian Demokrasi**

Beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli secara lengkapnya dijelaskan seperti dibawah ini:

1. Menurut Henry B. Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil--wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan--pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

2. Menurut Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

3. Menurut Yusuf Al--Qardhawi

Demokrasi adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai

4. Menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil--wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara.

5. Menurut John L. Esposito

Pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

#### 6. Menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

#### 7. Menurut Kranenburg

Demokrasi terbentuk dari dua pokok kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein (memerintah) yang maknanya adalah “ cara memerintah oleh rakyat”.

#### 8. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto

Demokrasi adalah suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu sistem dimana suatu negara diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

#### 9. Menurut Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people, and for the people). Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

#### 10. Menurut International Commission of Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

#### 11. Menurut Merriam, Webster Dictionary

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu paham yang menegaskan bahwa pemerintahan suatu negara di pegang oleh rakyat, karena pemerintahan tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

## 2.2 Sejarah Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *Demos* yang berarti rakyat dan *Cratos/Kratien/Kratia* yang artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*City State*) Yunani kuno khususnya Athena, merupakan demokrasi langsung (*Direct Democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang tidak berdasarkan mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani kuno dapat dilaksanakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi sederhana, wilayahnya terbatas (daerah terdiri dari kota dan daerah sekitar), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Selain itu, ketentuan-ketentuan demokrasi tidak berlaku bagi mayoritas dari budak belian dan pedagang asing.

Pada zaman Romawi sampai dengan abad pertengahan (abad XV) pelaksanaan demokrasi mengalami kemunduran karena banyak berkembang praktek-praktek tirani, oligarki, dan diktator. Namun semenjak zaman Renaissance (abad XIX), ajaran demokrasi bangkit kembali dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut,

- a) Rakyat tidak senang dengan adanya praktek-praktek yang sewenang-wenang dari penguasa.
- b) Rakyat menuntut persamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,
- c) Pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep atau teori-teori demokrasi yang mengarah kepada prinsip-prinsip di dalam hak asasi manusia.

Perkembangan demokrasi selanjutnya semakin dibutuhkan sebagai sistem pemerintahan oleh negara-negara di seluruh dunia. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Di dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat tidak langsung atau berdasarkan perwakilan (*Representative Democracy*).

### Macam-macam sistem demokrasi

Ada beberapa macam sistem demokrasi pemerintahan yang dipraktikkan didalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan itu terjadi karena setiap negara menyesuaikan demokrasi itu dengan sosial budaya dalam masyarakatnya. Namun, semua konsep menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

1. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat  
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan seperti berikut ini.

- a) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang--undang.

- b) Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.

2. Atas dasar prinsip ideologi

Berdasarkan paham ini ada dua bentuk demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip ideologi, yakni;

- a) Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari Demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak ikut campur tangan dan bertindak sewenang--wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

Menurut M. Carter dan Jhon Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila:

- 1) Yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat, dan
- 2) Bentuk pemerintahannya terbatas

Bila suatu lingkungan di lindungi oleh konvensi dari campur tangan pemerintahan atau hukum, maka rezim ini disebut *Liberal*.

- b) Demokrasi Rakyat

Demokrasi Rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme--komunisme. Demokrasi rakyat mencita--citakan kehidupan yang tidak menganal kelas sosial manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpinnya. Sementara menurut Prof. Miriam Budiardjo, komunis tidak merupakan sistem politik, akan tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai--nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.



## 2.3 Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut Almadudui, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Kekuasaan mayoritas
- Hak-hak minoritas
- Jaminan hak asasi manusia
- Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- Persamaan di depan hukum
- Proses hukum yang wajar
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

## 2.4 Unsur-unsur Demokrasi

### 1. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara

Dalam demokrasi, setiap warga negara berhak menentukan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Namun karena secara praktis tidak mungkin melibatkan semua warga suatu negara dalam pengambilan keputusan, maka digunakan prosedur pemilihan wakil rakyat. Warga negara memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.

Para wakil inilah yang diberi mandat untuk mengelola masa depan bersama warga negara melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan demokratis diberi kewenangan membuat keputusan melalui mandat yang diperoleh lewat pemilu.

### 2. Kebebasan

Unsur ke dua dan bahkan lebih mendasar dalam demokrasi adalah kebebasan, yaitu kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan media (koran, radio, TV). Kebebasan memungkinkan demokrasi berfungsi. Kebebasan memberi oksigen agar demokrasi dapat bernafas.

- Kebebasan berekspresi memungkinkan segala masalah bisa diperdebatkan, memungkinkan pemerintah dikritik, dan memungkinkan adanya pilihan-pilihan lain.
- Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul untuk melakukan diskusi.
- Kebebasan berserikat memungkinkan orang-orang untuk bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan atau cita-cita politik mereka.

Ketiga kebebasan ini memungkinkan rakyat mengambil bagian dalam proses demokrasi. Media yang bebas artinya media tidak dikendalikan oleh penguasa, membantu rakyat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tanpa Media yang bebas dan tanpa kebebasan berekspresi yang luas (melalui percakapan, buku buku, film film, dan bahkan poster--poster dinding), rakyat sering kali sulit mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, dan bahkan sulit membuat keputusan yang berbobot mengenai apa yang harus mereka pilih demi mencapai suatu keadaan masyarakat yang mereka inginkan.

### 3. Supremasi hukum (Daulat hukum)

Unsur penting lainnya, yang sering kali dianggap sudah semestinya ada di negara negara yang tradisi demokrasinya sudah lama adalah supremasi hukum (*rule of law*). Tidak ada gunanya pemerintah membiarkan semua kebebasan yang disebut di atas bertumbuh apabila pemerintah menginjak--injaknya. Pengalaman yang banyak negara menunjukan banyak pengkritik dijebloskan ke dalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan pemerintah dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan ada banyak diantara mereka ditembak mati secara diam--diam oleh agen--agen rahasia negara.

Agar kebebasan dapat tumbuh subur, rakyat harus yakin bahwa kebebasan itu berlaku tetap. Rakyat baru yakin akan hal itu apabila pihak--pihak yang bertugas untuk menegakkannya, terutama para hakim dan polisi, tidak dikendalikan oleh penguasa.

### 4. Pengakuan akan kesamaan warga negara

Dalam demokrasi semua warga negara diandaikan memiliki hak--hak politik yang sama, jumlah suara yang sama, hak pilih yang sama, dan akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak seorang pun mempunyai pengaruh lebih besar dari pada orang lain dalam proses pembuatan kebijakan. Kesamaan disini juga termasuk kesamaan di depan hukum dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi. Semuanya sama di hadapan hukum.

- Di bidang ekonomi, setiap individu memiliki hak yang sama melakukan usaha ekonomi (berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dsb.) untuk memenuhi dan meningkatkan taraf hidupnya.
- Di bidang budaya, setiap individu mempunyai kesamaan hak dalam mengembangkan seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahat, seni bangunan, dan sebagainya.
- Di bidang politik, setiap orang memilih hak politik yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas memilih, menjadi anggota salah satu partai politik, atau mendirikan partai politik baru sesuai perundang--undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui mekanisme yang disepakati dengan tidak membedakan status, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
- Di bidang hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.

- Di bidang pertahanan dan keamanan, setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara.

#### 5. Pengakuan akan supremasi sipil atas militer

Dalam sebuah negara yang benar-benar demokratis, sipil mengatur militer, bukan sebaliknya. Hal ini mengandung dua arti. Pertama, sipil mengendalikan militer. Kedua, militer aktif tidak diperkenankan menjadi pejabat negara (lurah, camat, walikota, bupati, gubernur, presiden, dan sebaliknya). Militer hanya bertanggung jawab mengamankan negara terhadap ancaman dari luar.

## **BAB III**

### **Pembahasan**

#### **3.1 Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam lima periode:

##### **1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi (1945--1950)**

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar, yaitu:

- Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh
- Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator
- Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

##### **2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945--1959)**

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode

ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Berikut penyebab demokrasi parlementer mengalami kegagalan:

- Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik

- Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah
- Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

### 3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959--1965)

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai--partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR--GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai--nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132--136)

### 4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru (1966--1998)

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun--tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke--2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah--olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program--program pembaruan pemerintahan baru.

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Kadaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, maupun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, Pemilihan Umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114--117)

## 5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 -- Sekarang)

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tata kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya lagi perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers

sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950--1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999--2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

### **3.2 Pelaksanaan Demokrasi Langsung Pada Orde Reformasi**

Pengertian Reformasi Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama--tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke--16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.

Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan--peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-- lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-- lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR --MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-- lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain dkeluarkannya :

- Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok--pokok reformasi
- Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
- Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
- Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Keberhasilan Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Dimana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Sistematika Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:

- Mengutamakan musyawarah mufakat
- Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
- Tidak memaksakan kehendak pada orang lain
- Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
- Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah
- Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur
- Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partai. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen:

I. Pembukaan

II. Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Sistem Pemerintahan Masa Reformasi (1998 – sekarang) Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut :



- a. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-- hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partai.
- b. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX/ MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan UU No 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah--langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara ,UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewa. Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.

Akibat Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi pancasila tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal, contohnya aksi demonstrasi yang besar--besaran di seluru lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi partai sehingga peranan partai cukup besar, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting berarti peranan demokrasi pancasila belumlah terealisasi. Dengan melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.

### **3.3 Kronologis Terjadinya Reformasi di Indonesia**

- Tanggal 10 Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun (1998--2003) yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.
- Tanggal 4 Mei harga BBM naik 71%, yang menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai kota, seperti 3 hari kerusuhan di Medan dengan korban 6 meninggal.
- Tanggal 8 Mei Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas.
- Tanggal 9 Mei Presiden Soeharto berangkat ke luar negeri dalam rangka kunjungan kenegaraan selama satu minggu ke Mesir.

- Tanggal 12 Mei Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Lesmana, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan. Sedangkan para mahasiswa yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit jumlah, setelah bentrok dengan aparat keamanan yang berusaha membubarkan para demonstrans.
- Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota solo. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan--pertemuan negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Di Kairo, Presiden Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.
- Tanggal 14 Mei demonstrasi terus bertambah besar hampir seluruh kota--kota di Indonesia, demonstrans mengepung dan menduduki gedung--gedung DPRD di daerah.
- 18 Mei Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden.
- Jendral Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Harmoko tidak mempunyai dasar hukum Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi"
- Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPO memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.
- Tanggal 19 Mei Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya.
- Tanggal 21 Mei Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9:00 WIB
- Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
- Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol--simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya.

### **3.4 Kondisi Demokrasi Saat Ini**

Tahun 2014 menjadi tahun ketiga pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009. Selain itu juga telah dilaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang juga dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini telah mencerminkan bahwa negara Indonesia telah berhasil menerapkan paham demokrasi terutama Demokrasi Pancasila yang telah diterapkan oleh negara Indonesia.

Namun yang menjadi titik perhatian saat ini adalah pro--kontra di Gedung DPR atas diputuskannya Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung saat sidang

paripurna anggota DPR akhir--akhir ini. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Apalagi keputusan diambil melalui proses voting, bukan musyawarah mufakat sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Mekanisme pengambilan keputusan anggota DPR seperti itu justru lebih mengarah kepada sistem liberal barat, bukan Pancasila.

Menurut Ahmad Amran Nur, Sekertaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Barat, pilkada langsung dengan melibatkan rakyat lebih sesuai dengan perwujudan Demokrasi Pancasila. Pancasila memiliki jiwa dan semangat integrasi bangsa, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia bukan lagi mengenai jumlah sila yang terdapat dalam pancasila, lebih dari itu yang perlu dijalankan adalah implementasi dari makna yang terkandung dalam kelima sila itu sendiri.

“Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa bukanlah ideologi yang ingin menguasai bangsa di atas bangsanya sendiri, sehingga semangat DPR memutuskan pilkada tidak langsung bertentangan dengan nilai demokrasi dalam pancasila, karena tidak melibatkan masyarakat secara utuh,” katanya. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya dapat dipahami bahwa keputusan sejatinya diambil melalui proses berpikir secara kolektif seluruh masyarakat.

Kesimpulannya, dengan diputuskannya RUU Pilkada lewat DPR atau tidak langsung ini, tentunya telah menghilangkan hak--hak rakyat untuk ikut serta dalam mewujudkan negara Indonesia yang demokratis sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang--Undang Dasar 1945.

## **BAB IV**

### **Kesimpulan**

- 1) Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang setiap warganya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan. Demokrasi mengandung pengertian secara tidak langsung bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan menganut asas bahwa hakikatnya pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 2) Unsur--unsur yang lekat dalam demokrasi ada lima hal yang mencakup partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, kebebasan, supremasi hukum (daulat hukum), pengakuan akan kesamaan warga negara, dan pengakuan akan supremasi sipil atas militer.
- 3) Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan demokrasi yang berbeda--beda tiap periodenya dan terbagi menjadi lima periode yaitu pada masa revolusi (1945--1950), demokrasi parlementer (1945--1959), demokrasi terpimpin (1959--1965), demokrasi pemerintahan orde baru (1966--1998), dan demokrasi pancasila pada masa reformasi sampai sekarang (1998--sekarang)
- 4) Demokrasi pancasila yang dianut Indonesia kini dapat dikatakan lebih baik dari kondisi demokrasi di Indonesia sebelumnya karena mulai terlihat adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan) yang semakin proaktif dan kebebasan pers untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

## Daftar Pustaka

<http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/11/sejarah--perkembangan--demokrasi--di.html>  
[https://www.academia.edu/8898698/Makalah\\_Pelaksanaan\\_Demokrasi\\_Di\\_Indonesia\\_Pada\\_Era\\_Reformasi](https://www.academia.edu/8898698/Makalah_Pelaksanaan_Demokrasi_Di_Indonesia_Pada_Era_Reformasi)  
<https://husainnur.wordpress.com/2011/04/04/pelaksanaan--demokrasi--di--indonesia/>  
<http://utariiratu.blogspot.co.id/2013/02/makalah--pelaksanaan--demokrasi--di.html>  
<https://www.scribd.com/doc/46401876/Sejarah--Singkat--Demokrasi>  
<http://www.artikelsiana.com/2015/08/demokrasi--pengertian--ciri--ciri--macam.html>  
<https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture--1/ilmu--kewarganegaraan/perkembangan--demokrasi--di--indonesia/>  
<http://estupujianto.blogspot.co.id/2014/11/pelaksanaan--demokrasi--langsung--pada--era.html>  
[http://www.academia.edu/9618230/Makalah\\_Latar\\_Belakang\\_Lahirnya\\_Reformasi\\_Indonesia](http://www.academia.edu/9618230/Makalah_Latar_Belakang_Lahirnya_Reformasi_Indonesia)  
Materi Demokrasi.pptx (from KWN lecturer)